**ANALISIS YURIDIS PT.NUSA KONTRUKSI ENJINERING TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI KORPORASI**

**(STUDI PUTUSAN NOMOR 3/PID.SUS-TPK/2018/PT.DKI)**

Mohammad Alvian Adi Nugroho

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

mohammad.17040704019@mhs.unesa.ac.id

 **Pudji Astuti**

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

pudjiastuti@unesa.ac.id

**Abstrak**

Kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan Dudung Purwadi Direktur Utama PT Duta Graha Indah (DGI) yang telah berganti nama menjadi PT Nusa Konstruksi Enjiniring (PT NKE) atas proyek pengadaan sarana dan prasarana pendidikan khusus penyakit infeksi dan pariwisata Universitas Udayana Tahun Anggaran 2009 - 2010, setelah melakukan korupsi secara bersama-sama dan berlanjut berupa kesepakatan antara proyek lain yang dipercaya. Hakim menjatuhkan pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 UU korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke 1 juncto pasal 64 ayat (1) KUHP. Peneliti mencoba menganalisis perbuatan Direksi PT.NKE dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana korporasi dan pidana yang diputuskan oleh Hakim sudah sesuai dengan keadilan substantif di masyrakat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, Karena membahas tentang permasalahan yang menyangkut putusan nomor 3/ Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI. sehingga Penulis memulai dari suatu peristiwa hukum yang dikaji melalui sistem norma seperti peraturan perundang-undangan asas-asas hukum maupun doktrin-doktrin hukum yang diajarkan para ahli agar ditemukannya konstruksi hukum ataupun hubungan hukum nya dengan tujuan untuk menjawab permasalahan hukum yang terjadi. Pada Pasal 20 ayat (2) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dihubungkan dengan unsur kesalahan *actus reus* dan *mens rea*, maka pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap PT.NKE dalam putusan perkara nomor 3/pid.sus-tpk/2018/pt.dki telah terpenuhi. Dalam hal ini penulis berpendapat, semestinya hakim terlebih dulu mengedepankan pilihan keadilan substantif, yang sesuai dengan hati nurani dan rasa keadilan masyarakat. Keadilan substantif dalam penegakan hukum pidana di pengadilan, hanya dapat dihadirkan melalui pendekatan *Legal Pluralisme* dengan memperhatikan *state law, living law* dan *natural law* secara simultan.

**Kata Kunci** : korupsi, korporasi,putusan.

**Abstract**

The corruption case committed by Dudung Purwadi, the President Director of PT Duta Graha Indah (DGI), which has changed its name to PT Nusa Konstruksi Enjiniring (PT NKE) for the project to procure educational facilities and infrastructure for infectious diseases and tourism at Udayana University Fiscal Year 2009 - 2010, after committing corruption together and continuing in the form of an agreement between other trusted projects. The judge handed down Article 2 paragraph (1) in conjunction with Article 18 of the Corruption Law in conjunction with Article 55 paragraph (1) to 1 in conjunction with Article 64 paragraph (1) of the Criminal Code. Researchers try to analyze the actions of the Directors of PT.NKE in Decision Number 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI can be classified as a corporate crime and the crime decided by the judge is in accordance with substantive justice in society. This study uses a normative juridical research type, because it discusses issues related to decision number 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI. so that the author starts from a legal event that is studied through a system of norms such as legislation, legal principles and legal doctrines taught by experts so that legal constructions or legal relationships are found with the aim of answering legal problems that occur. In Article 20 paragraph (2) of the Law on the Eradication of Criminal Acts of Corruption and related to the elements of actus reus and mens rea errors, the corporate criminal responsibility for PT.NKE in the case decision number 3/pid.sus-tpk/2018/pt.dki has been fulfilled . In this case, the author is of the opinion that the judge should first prioritize the choice of substantive justice, which is in accordance with the conscience and sense of justice of the community. Substantive justice in criminal law enforcement in court, can only be presented through a Legal Pluralism approach by taking into account state law, living law and natural law simultaneously.

**Keyword :** corruption, corporations, decisions.

# **PENDAHULUAN**

Korporasi merupakan gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai subjek hukum tersendiri dan merupakan personifikasi. Menurut B. Clinard dan Peter C Yeager yaitu “Setiap tindakan korporasi biasa yang dikenakan sanksi Negara berdasarkan hukum administrasi Negara, hukum perdata ataupun hukum pidana. Kejahatan korporasi merupakan bagian dari kejahatan kerah putih, merupakan kejahatan yang terorganisasi dalam hubungan yang kompleks dan mendalam antara seorang pemimpin eksekutif dan manager dalam suatu tangan. Dapat juga berbentuk sebagai perusahaan keluarga, namun tetap dalam kejahatan kerah putih” (Damayanti 2015).

Kejahatan korporasi sering kali menimbulkan kerugian yang sulit diestimasi karena akibat yang ditimbulkannya berganda, sementara pidana yang dijatuhkan hakim tidak mencerminkan tingkat kejahatan mereka. Kejahatan korporasi umumnya dilakukan oleh suatu perusahaan atau badan hukum yang bergerak dalam bidang bisnis dengan berbagai tindakan yang bertentangan dengan hukum pidana yang berlaku. Dari berbagai negara maju dikemukakan bahwa identifikasi kejahatan korporasi dapat berupa tindak pidana seperti pelanggaran undang-undang monopoli, penipuan melalui komputer, berkaitan dengan pajak dan cukai, pelanggaran administrasi, perburuhan, pemcemaran lingkungan hidup, dan korpusi.

Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi (UU Korporasi), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korporasi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (UU Korupsi), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahandan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU Pencucian Uang), merupakan undang-undang khusus diluar KUHP yang mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi bertujuan agar korporasi dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang menimbulkan kerugian. Aturan tersebut diformulasikan sedemikian rupa agar dapat menjerat korporasi yang melakukan tindak pidana, namun ketentuan tersebut ditempatkan sebagai *ultimum remidium*. Sehingga korporasi sebagai *non state actor* telah menikmati *impunity* yaitu kekebalan hukum atas berbagai kejahatan yang dilakukan sehingga meskipun korporasi telah melakukan kejahatan, tidak ada usaha untuk memprosesnya secara maksimal.

Korporasi sebagai subjek hukum (*recht person*) merupakan bentuk atificial person seorang manusia yang memiliki hak dan kewajiban hukum (Aries 2018). Korporasi dapat dikenakan pertanggungjawaban dan dijatuhi sanksi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Korporasi. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda. Sedangkan pidana tambahannya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang dilanggarnya.

Pasal 20 ayat (1) dan (2) UU korupsi menyebutkan bahwa:

1. *“Bilamana terdapat tindak pidana korupsi yang dilakukan atas dasar korporasi, maka ketentuan ni mengenai tuntutan dan penjatuhan nya dapat dibebankan terhadap korporasi dan pengurusnya”.*
2. *“Apabila tindak pidana korupsi dilakukan atas dasar korporasi namun yang telah melakukan adalah orang-orang baik itu ikatan kerja ataupun berdasarkan hal lain yang tindakannya menyertai dalam kaitannya dengan korporasi atau secara bersama atau sendiri maka berhak mendapatkan sanksi pidana yang sesuai dengan aturannya”.*

Korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dapat melakukan tindakan pidana dan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana, menimbulkan konsekuensi yang berpotensi menimbulkan permasalahan dalam penerapannya. Permasalahan tersebut berkaitan dengan jenis sanksi pidana yang dapat diterapkan, jika dilakukan pengkajian secara mendalam kewenangan yang dilaksanakan pengurus merupakan mandat atau perintah dari pemilik modal sebagai contoh Kewenangan direksi Perseroan Terbatas (PT), Karena merupakan organ PT maka mempunyai wewenang berdasarkan Pasal 94 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Kurniawan 2019).

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT, direksi dapat dikatakan sebagai organ perseroan mempunyai tanggung jawab penuh akan kepengurusan perseroan tersebut. Maka, sesuai dengan tujuan dan kepentingan perseroan dapat mewakilinya baik itu didalam dan diluar pengadilan sesuai dengan apa yang ditentukan oleh anggaran dasar.

Upaya penyelesaian permasalahan korupsi oleh korporasi di Indonesia, diatur dalam UU Korupsi, tepatnya pada Pasal 20. **T**ujuannya untuk memberikan Efek Jera bagi korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi dengan menjatuhkan sanksi berupa pidana denda dan pidana tambahan. **P**enjatuhan pidana denda dalam tindak pidana korupsi ditujukan untuk pemasukan penerimaan kas negara, sedangkan penjatuhan pidana tambahan berupa pidana uang pengganti untuk memulihkan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi (Ali 2014). Adanya penjatuhan sanksi pidana, diharapkan mampu memulihkan aset negara (*asset recovery*) yang dirampas.

Penjatuhan sanksi pidana pada korporasi sebagai pelaku korupsi tergantung pada hakim yang mempunyai kewenangan untuk membuat keputusannya. Seharusnya Hakim dalam menjatuhkan sanksi harus memperhatikan berbagai pertimbangan seperti kerugian negara, bertujuan membuat jera pelakunya, nilai-nilai yang hidup di masyarakat dan faktor yuridisnya. Akan tetapi, praktiknya Hakim seringkali memberikan putusan yang timpang antara aspek hukum yang diharapkan (*dos sollen)* Dengan aspek penerapan hukum yang ada di masyarakat (*Das Sein*) (Agiyanto 2013). Sebagai contoh kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan Dudung Purwadi Direktur Utama PT Duta Graha Indah (DGI) yang telah berganti nama menjadi PT Nusa Konstruksi Enjiniring (PT NKE) atas proyek pengadaan sarana dan prasarana pendidikan khusus penyakit infeksi dan pariwisata Universitas Udayana Tahun Anggaran 2009 - 2010, setelah melakukan korupsi secara bersama-sama dan berlanjut berupa kesepakatan antara proyek lain yang dipercaya **(Rachman 2019).** **N**amun Dudung Purwadi mempunyai tujuan lain yaitu memperkaya perusahaan. meskipun Dudung Purwadi tidak melakukan pelanggaran dalam pelelangan proyek tersebut tetapi dialah yang memberikan izin dan menyetujuinya.

Dudung Purwadi (terdakwa) juga melakukan kecurangan dalam jserah jterima jpekerjaan jhasil jproyek, jyang jmenyebabkan jkerugian jkeuangan jnegara jsebesar jRp. j25.953.784.580,57 j jdan jmemberikan jkeuntungan jbagi jnya jsebesar jRp.42.717.417.289. jSelain jproyek jtersebut, jterdapat j7 jproyek jlainnya jyang jberasal jdari jtindak jpidana jkorupsi jdiantaranya jproyek jpembangunan jgedung jWisma jAtlet j(Palembang), jproyek jpembangunan jgedung jBalai jpendidikan jdan jpelatihan jilmu jpelayaran j(Surabaya jYouTube jproyek jpembangunan jgedung jRumah jSakit jpendidikan JUniversitas JMataram j(Nusa jTenggara jBarat) jproyek jpembangunan jgedung jrumah jsakit jumum jdaerah j(RSUD) jSungai jdaerah jah j j(Provinsi jSumatera jBarat), j j jproyek jpembangunan jgedung jCardiac j jrumah jsakit jAdam jMalik j(Sumatera jUtara) jproyek jpembangunan jPaviliun jrumah jsakit jAdam jMalik j(Sumatera jUtara), j jproyek jpembangunan jrumah jsakit jtropis jUniversitas jAirlangga, jSurabaya j(Jawa jTimur).

Berdasarkan jtindak jpidana jkorupsi jyang jdilakukan jterdakwa, jHakim jmemutus jperkara jtersebut jdalam jkeputusan jnomor j3/Pi.Sus-TPK/2018/PT.DKI jYang jmenyatakan jbahwa jterdakwa jPT jNusa jkonstruksi jenjiniring jtelah jterbukti jsecara jsah jdan jmeyakinkan jbersalah jmelakukan jtindak jpidana jkorupsi jsecara jbersama-sama jdan jberlanjut. jHakim jmenjatuhkan jpasal j2 jayat j(1) jjuncto jPasal j18 jUU jkorupsi jjuncto jpasal j55 jayat j(1) j jke j1 jjuncto jpasal j64 jayat j(1) jKUHP jdengan jsanksi jdenda jsejumlah j jRp. j250.000.000 j(dua jratus jlima jpuluh jjuta jrupiah) j. j**Pada** pidana jtambahan jpembayaran juang jpengganti jkepada jPT jNKE jmasing-masing jsebesar jRp. j14.487.659 j.605,00 j(empat jbelas jmiliar jempat jratus jdelapan jpuluh jtuju jjuta jenam jratus jlima jpuluh jsembilan jribu jenam jratus jlima jrupiah) jUntuk jproyek jpembangunan jrumah jsakit jpendidikan jkhusus jpenyakit jinfeksi jpariwisata jUniversitas jUdayana jtahun j2009 jdan jtahun j2010, j jdan juang jpengganti jsebesar jRp. j36.877.717.289,00 j(tiga jpuluh jenam jmiliar jdelapan jpuluh jsembilan jrupiah) jUntuk j jproyek jpembangunan jWisma jAtlet jdan jGedung jSerbaguna jpemerintahan jprovinsi jSumatera jSelatan jtahun j2010-2011. jBerdasarkan jpasal j2 jayat j(1) jUU jkorupsi j jberbunyi j:

*“Setiap jorang jyang jsecara jmelawan jhukum jmelakukan jperbuatan jmemperkaya jdiri jsendiri jatau jorang jlain jatau jsuatu jkorporasi jyang jdapat jmerugikan jkeuangan jnegara jatau jperekonomian jnegara, jdipidana jpenjara jdengan jpidana jseumur jhidup jatau jpidana jpenjara jpaling jsingkat j4 j(empat) jtahun jdan jpaling jlama j20 j(dua jpuluh) jtahun jdan jdenda jpaling jsedikit jRp.200.000.000,00 j(dua jratus jjuta jrupiah) jdan jpaling jbanyak jRp.1.000.000.000,00 j(satu jmiliar jrupiah).”*

L.Van jApeldoorn jberpendapat jbahwa jtidak jboleh jdipandang jsama jaktif jpenyamarataan, jkeadilan jbukan jberarti jbahwa jtiap-tiap jorang jmemperoleh jbagian jyang jsama.Maksudnya jkeadilan jmenuntut jtiap-tiap jperkara jharus jditimbang jtersendiri, jartinya jadil jbagi jseseorang jbelum jtentu jadil jbagi jlainnya **(Agiyanto 2013)**. Penegakan jhukum jdi jIndonesia jsemata-mata jhanya jberorientasi jpada jkepastian jhukum jdan jmengabaikan jaspek jkeadilan jbagi jmasyarakat. j**Pada** jsaat jini jbelum jsepenuhnya jmencerminkan jkeadilan jbagi jmasyarakat. jKeadilan jmasih jmenjadi jbarang jmahal jyang jsulit jdijangkau jmasyarakat. Dari berbagai jperkara jhukum jseringkali jmencuat jdan jmenjadi jperbincangan jkarena jdianggap jtelah mengabaikan jkeadilan jsepatutnya jdinikmati jmasyarakat. **Karena dianggap telah mengabaikan keadilan yang sepatutnya dinikmati oleh masyarakat, yang berdampak pada hilangnya kepercayaan masyarakat pada penegak hukum di Indonesia.** j

Kasus jPT. jNKE jjumlah jkerugian jkeuangan jnegara jditentukan joleh jBadan jPemeriksa jKeuangan jdan jPembangunan j(BPKP) jsebesar jRp.25.953.784.580,57. jNamun, jjaksa jmenuntut jterdakwa jdengan jpidana juang jpengganti jsebesar jRp.188.732.756.416,00 jdan jhakim jmemutuskan jpidana juang jpengganti jsebesar jRp.85.490.234.737,00 **(Rachman 2019)**.

Penulis jberpendapat jbahwa jterdapat jkeganjilan jputusan jhakim jdalam jmenentukan jjumlah jpidana juang jpengganti. Penuntutan jdan jpenjatuhan jpidana juang jpengganti jditentukan jtidak jhanya jdari jproyek jpembangunan jsarana jdan jprasarana jrumah jsakit jkhusus jpenyakit jinfeksi jdan jpariwisata jUniversitas jUdayana jsaja, jmelainkan jke-7 jproyek jlainnya. JSedangkan, jakibat jyang jditimbulkan jdari jperbuatan jterdakwa jyakni jmenikmati jharta jbenda jhasil jkorupsi jberupa jkerugian. jKeuangan jNegara jhanya jditentukan joleh jproyek jpengadaan jsarana jdan jprasarana jPendidikan jkhusus jpenyakit jinfeksi jdan jpariwisata jUniversitas jUdayana jTahun jAnggaran j2009-2010.

Hal jini jsangat jmerugikan jkeuangan jnegara japabila jmenjatuhkan jpidana juang jpengganti jtidak jdisesuaikan jdengan jkerugian jkeuangan jnegara jdan jperaturan jperundang-undangan jyang jberlaku. jKarena jperbuatan jtersebut jtidak jhanya jmerugikan jmasyarakat jtetapi jnegara j**juga**j dirugikan jdari jtindak jpidana jkorupsi, jserta jdapat jmenimbulkan jkeputusan jtersebut jmenjadi jtidak jsesuai jdengan jtujuan jpemidanaan jdan jterdakwa jdalam jmempertanggungjawabkan jperbuatannya jmenjadi jtidak jsempurna. jKurang jtegasnya jpada jpenjatuhan jsanksi jpidana joleh jHakim jterhadap jkorporasi jyang jtidak jsesuai jdengan jkonsep jpertanggungjawaban jpidana jdan jperaturan jperundang-undangan jyang jberlaku jmenimbulkan jkesulitan jdalam jmemberantas jkorupsi jyang jdiberikan joleh jkorporasi jberdasarkan jUU jkorupsi. jBerdasarkan juraian jdi jatas jpenulis jberkeinginan juntuk jmenganalisis JPutusan JNomor J3/Pid.Sus-Tpk/2018/Pt.Dki Jdalam Jartikel Jyang Jberjudul J: J JAnalisis JYuridis JPT. JNusa JKonstruksi JEn**j**inering Jterhadap Jtindak Jpidana Jkorupsi Jkorporasi J(Studi Jputusan Jnomor J3/Pid.Sus-Tpk/2018/Pt.Dki).

Dari jpen**j**elasan jpada jlatar jbelakang jmasalah jtersebut, jpeneliti jmembuat jrumusan jmasalah jyaitu: j1. jApakah jperbuatan jDireksi jPT.NKE jdalam jPutusan jNomor j3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI jdapat jdiklasifikasikan jsebagai jtindak jpidana jkorporasi j? j2. jApakah jpidana jyang jdiputuskan joleh jHakim jsudah jsesuai jdengan jkeadilan jsubstantif jdi jmasyrakat j? jTujuan jdari jpenelitian jini jadalah juntuk jmenganalisis jApakah jperbuatan jDireksi jPT.NKE jdalam jPutusan jNomor j3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI jdapat jdiklasifikasikan jsebagai jtindak jpidana jkorporasi jdan jjuga jkeadilan jsubstantif jdi jmasyarakat.

**METODE**

Penelitian jini jmenggunakan jjenis jpenelitian jyuridis jnormatif, jkarena jmembahas jtentang jpermasalahan jyang jmenyangkut JPutusan JNomor j3/ jPid.Sus-TPK/2018/PT.DKI. jSehingga jpenulis jmemulai jdari jsuatu jperistiwa jhukum jyang jdikaji jmelalui jsistem jnorma jseperti jperaturan jperundang-undangan jasas-asas jhukum jmaupun jdoktrin-doktrin jhukum jyang jdiajarkan jpara jahli jagar jditemukannya jkonstruksi jhukum jataupun jhubungan jhukum jnya jdengan jtujuan juntuk jmenjawab jpermasalahan jhukum jyang jterjadi.

Pendekatan jpenelitian jyang jhendak jdipakai jdalam jmelakukan jpenelitian jnormatif jini jadalah jperundang-undangan *j(statute japproach) j,* jdan jpendekatan jkonseptual j*(conceptual japproach). j*Pendekatan jperundang-undangan *j(statute japproach) j*adalah jPendekatan jmenggunakan jkonsep jdasar jpembuatan jundang-undang jbeserta jpenerapannya j(Marzuki 2017). jPendekatan jkonseptual j*(conceptual japproach) j*adalah jpendekatan jyang jmenggunakan jpendekatan jdan jdoktrin jpara jahli jhukum jyang jdikembangkan jsecara jbertahap jdalam jkeilmuan jhukum juntuk jmembentuk jSebuah jrancangan jyang jdijadikan jsebagai jpatokan jdasar jdi jdalam jpenelitian j(Marzuki 2017). jPendekatan jkonseptual jyang jdimaksud jadalah juntuk jmenganalisa jbahan jhukum jsehingga jdapat jmenemukan jpengertian jdan jkonsep jhukum jyang jdiharapkan jdapat jmembantu jdalam jpenyusunan jargumentasi jhukum jguna jmenjawab jrumusan jmasalah jyang jmenjadi jtitik jtolak jpenelitian jini. j jAdapun jkonsep jyang jakan jdibahas jberkaitan jdengan jkonsep jkeadilan jsubstantif jyang jada jdi jmasyarakat. jPenelitian jini jjuga jmenggunakan jpendekatan jkasus j(*case japporoach*) jyang jdilakukan jdengan jcara jmelakukan jtelaah jterhadap jkasus-kasus jyang jberkaitan jdengan jisu jyang jdihadapi jyang jtelah jmenjadi jputusan jpengadilan jyang jmempunyai jkekuatan jhukum jtetap.

Bahan jhukum jyang jdigunakan jdalam jpenelitian jini jadalah jbahan jhukum jprimer, jdan jbahan jhukum jsekunder. jBahan jhukum jprimer jadalah jbahan jhukum jyang jmempunyai jsifat jauthoritative jyang jartinya jmempunyai jotoritas. jBahan jhukum jprimer jterdiri jdari jperundang-undangan, jcatatan-catatan jresmi jatau jrisalah jdalam jpembuatan jperundang-undangan jdan jputusan-putusan jHakim. jBahan jhukum jprimer jyang jdigunakan jdalam jpenulisan jartikel jini jantara jlain:

1. Undang-Undang jNomor j31 jtahun j1999 jtentang jpemberantasan jTindak jPidana jKorupsi jSebagaimana jtelah jdiubah jdengan jUndang-Undang jNomor j20 jTahun j2001;
2. Undang-undang jRepublik jIndonesia jNomor j19 jTahun j2019 jtentang jPerubahan jKedua jAtas jUndang-Undang jNomor j30 jTahun j2002 jtentang jKomisi jPemberantasan jTindak jPidana jKorupsi;
3. Undang-Undang jNomor j40 jTahun j2007 jtentang jPerseroan jterbatas;
4. Undang-undang jNomor j6 jTahun j1984 jtentang jPOS;
5. Undang-undang jNomor j5 jTahun j1984 jtentang jPerindustrian;
6. Undang-undang jNomor j10 jtahun j1998 jtentang jPerbankan;
7. Undang-undang jNomor j22 jTahun j1997 jtentang jNarkotika;
8. Undang-undang jNomor j8 jTahun j1995 jtentang jPasar jModal;
9. Undang-undang jnomor j5 jtahun j1997 jtentang jPsikotropika;
10. Undang-undang jNomor j32 jTahun j2009 jtentang jLingkungan jHidup;
11. Undang-undang jnomor j8 jtahun j1969 jtentang jperlindungan jkonsumen;
12. Undang-undang jnomor j8 jtahun j2010 jtentang jpencucian juang;
13. Undang-undang jnomor j20 jtahun j2001 jtentang jtindak jpidana jkorupsi;
14. Peraturan jmenteri jnomor j13 jtahun j2016 jtentang jtata jcara jpenanganan jperkara jtindak jpidana joleh jkorporasi;
15. Kitab jUndang-Undang jhukum jpidana;
16. Putusan jNomor j3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI;
17. Yurisprudensi.

Pengumpulan jbahan jhukum jdiperoleh jdari jperaturan jperundang-undangan, jliteratur jyang jberkaitan jdengan jpermasalahan jpenelitian. j jBahan jhukum jini jjuga jdidapatkan jdari jinternet, jmaupun jmedia jlainnya. jTeknik janalisis jbahan jhukum jyang jdigunakan jadalah janalisis jpreskriptif, jyang jbertujuan juntuk jmemberikan jargumentasi jyang jtepat jberkaitan jdengan jpermasalahan jpenelitian.

**HASIL jDAN jPEMBAHASAN**

1. **Hasil**
2. **Kronosolgi jKasus**

Awalnya jkasus jterjadi jakhir jtahun j2008, jDudung jPurwadi jDirektur jUtama jPT. jNKE jyang jdahulu jbernama jPT. jDuta jGraha jIndah jbersama jdengan jMohammad jEl jIdris jselaku jWakil jDirektur jMarketing jPT. jNKE jmeminta jbantuan jMuhammad jNazaruddin jselaku janggota jDPR jdan jpanitia jtender jproyek jtersebut jsupaya jmendapatkan jproyek jpembangunan jdari jpemerintah jdan jMuhammad jNazarudin jsegera jmengabulkan jpermintaan jtersebut jdengan jsyarat jMuhammad jNazaruddin jmendapatkan j*fee j*sebesar j15% jdari jnilai j*rill jcost* jkontrak.

Tanggal j29 jMei j2009 jpemerintah jmelaksanakan jpengadaan jlelang jproyek jpembangunan j jPengadaan jSarana jdan jPrasarana jPendidikan jKhusus jPenyakit jInfeksi jdan jPariwisata jUniversitas jUdayana jdengan jnilai jpagu jatau jbatas janggaran jRp.55.000.000.000,00 j(lima jpuluh jlima jmiliar jrupiah). jPT. jNKE jmemenangkan jlelang jtersebut, j jselain jbantuan jdari jMuhammad jNazaruddin, jPT. jNKE jmenawarkan jnilai jpagu jyang jrendah jkepada jpemerintah jyaitu jsebesar jRp.46.745.000.000,00 j(empat jpuluh jenam jmiliar jtujuh jratus jempat jpuluh jlima jjuta jrupiah).

Telah jdiketahui jjuga jPT. jNKE jmelakukan jkecurangan jdengan jmenetapkan jpekerjaan jtelah jselesai j100% jberdasarkan jpada jBerita jAcara jSerah jTerima jPekerjaan jNomor j03.10/ jH14.11/ jLK/ jXII/ j2009 jtanggal j30 jDesember j2009 jnamun jberdasarkan jpenelitian jdari jahli jITB jyang jmelihat jdari jsegi jkonstruksi jbangunan jdan jkualitas jbangunan jbahwa jbangunan jtersebut jbaru jterealisasi j67,03% jsehingga jmenimbulkan jkerugian jkeuangan jNegara jsebesar jRp.7.837.004.150,81 j(tujuh jmiliar jdelapan jratus jtiga jpuluh jtujuh jjuta jempat jribu jseratus jlima jpuluh jrupiah jdelapan jpuluh jsatu jsen).

Pada jtahun janggaran j2010 jpemerintah jmengadakan jlelang jpembangunan jpekerjaan jlanjutan jtahap jII jPembangunan jPengadaan jSarana jdan jPrasarana jPendidikan jKhusus jPenyakit jInfeksi jdan jPariwisata jUniversitas jUdayana jdengan jnilai jpagu jRp.110.000.000.000,00 j(seratus jsepuluh jmiliar jrupiah). jUntuk jmendapatkan jpekerjaan jtersebut, jDudung jPurwadi jselaku jDirektur jUtama jPT. jNKE jmeminta jkepada jMuhammad jNazaruddin jselaku janggota jDPR jdan jpanitia jdari jtender jproyek jtersebut jagar jmendapat jproyek jpembangunan jtahun janggaran j2009 jdengan jpersyaratan jnilai j*rill jcost* jkontrak jyang jsama.

Selain jproyek jpembangunan jPengadaan jSarana jdan jPrasarana jPendidikan jKhusus jPenyakit jInfeksi jdan jPariwisata jUniversitas jUdayana jtahun janggaran j2009-2010, jditemukan j7 j(tujuh) jproyek jpembangunan jlainnya jyang jmerupakan jbantuan jdari jMuhammad jNazarudin jantara jlain j:

1. Proyek jPembangunan jGedung jWisma jAtlet jJakabaring jdi jPalembang jProvinsi jSumatera jSelatan jTahun jAnggaran j2010;
2. Proyek jPembangunan jGedung jBalai jPendidikan jdan jPelatihan jIlmu jPelayaran j(BP2IP) jSurabaya;
3. Proyek jPembangunan jGedung jRumah jSakit jPendidikan jUniversitas jMataram jdi jMataram jProvinsi jNusa jTenggara jBarat;
4. Proyek jPembangunan jGedung jRumah jSakit jUmum jDaerah j(RSUD) jSungai jDareh jdi jKabupaten jDharmasraya, jProvinsi jSumatera jBarat;
5. Proyek jPembangunan jGedung jCardiac jdi jRumah jSakit jAdam jMalik jMedan, jProvinsi jSumatera jUtara;
6. Proyek jPembangunan jPaviliun jdi jRumah jSakit jAdam jMalik jMedan, jProvinsi jSumatera jUtara;
7. Proyek jPembangunan jRumah jSakit jTropis jUniversitas jAirlangga, jSurabaya, jProvinsi jJawa jTimur.
8. **Pertimbangan jHakim**

Dalam jputusan jNomor j3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI, jdasar jpertimbangan jhakim jbaik jsecara jyuridis jdan jnon-yuridis jtelah jsesuai jdengan jdakwaan. jAkan jtetapi, jpenulis jmenilai jhakim jdalam jmenjatuhkan jsanksi jkepada jterdakwa jdalam jkasus jini jtidak jsesuai jdengan jketentuan jperaturan jperundang-undangan. jKetidaksesuaian jini jterjadi jkarena jhakim jdalam jmempertimbangkan jkasus jterdakwa jPT. jNusa jKonstruksi jEnjiniring, jhanya jmelihat jdari jsegi jsubjek jhukum jtanpa jmelihat jdari jsegi jpertanggungjawaban jpidananya jsehingga jpemberatan jsanksi jpidana jkepada jPT. jNusa jKonstruksi jEnjiniring jselaku jkorporasi jtidak jdilaksanakan.

Pertimbangan jdalam jputusan jhakim jtidak jhanya jbersifat jlogis, jrasional jdan jilmiah jtetapi jharus jbersifat jintuitif jirasional. jIntuitif jirasional jadalah jkepekaan jhati jnurani jdan jperasaan jyang jseimbang jdengan jrasio jdan jlogika jsehingga jdapat jmelahirkan jkeadilan. j jUntuk jmenjatuhkan jputusan jterhadap jterdakwa jsebagai jpelaku jtindak jpidana jkorupsi, jhakim jharus jmemuat jpertimbangan-pertimbangan. jDalam jputusan jnomor j3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI jpertimbangan jdibagi jmenjadi jdua jkategori jdi jantaranya j:

1. **Pertimbangan jYuridis**
2. **Dakwaan jJaksa jPenuntut jUmum**

Dakwaan jterhadap jjaksa jpenuntut jumum jterdakwa jdijatuhkan jdalam jbentuk jdakwaan jalternatif, jyaitu j: j(Putusan et al. 2018)

* Dakwaan jPertama jPasal j2 jayat j(1) jjo jPasal j18 jUndang-Undang jRepublik jIndonesia jNomor j31 jTahun j1999 jtentang jPemberantasan jTindak jPidana jKorupsi jsebagaimana jtelah jdiubah jdengan jUndang-Undang jRepublik jIndonesia jNomor j20 jTahun j2001 jtentang jPerubahan jAtas jUndang-Undang jRepublik jIndonesia jNomor j31 jTahun j1999 jtentang jPemberantasan jTindak jPidana jKorupsi jjo. jPasal j55 jayat j(1) jke-1 jdan jPasal j64 jayat j(1) jKitab jUndang-Undang jHukum jPidana.
* Dakwaan jKedua jPasal j3 jjo. jPasal j18 jUndang-Undang jRepublik jIndonesia jNomor j31 jTahun j1999 jtentang jPemberantasan jTindak jPidana jKorupsi jsebagaimana jtelah jdiubah jdengan jUndang-Undang jRepublik jIndonesia jNomor j20 jTahun j2001 jtentang jPerubahan jAtas jUndang-Undang jRepublik jIndonesia jNomor j31 jTahun j1999 jtentang jPemberantasan jTindak jPidana jKorupsi jjo. jPasal j55 jayat j(1) jke-1 jdan jPasal j64 jayat j(1) jKitab jUndangUndang jHukum jPidana.
1. **Tuntutan jPidana j**

Setelah jmendengar jdan jmemperhatikan jketerangan jdari jsaksi-saksi jserta jalat jbukti jyang jdiajukan jdi jmuka jpersidangan, jmendengar juraian jtuntutan jpidana jJaksa jPenuntut jUmum jyang jpada jpokoknya jpenuntut jsupaya jMajelis jHakim jmemutuskan j:

* Menyatakan jPT jNusa jKonstruksi jEnjiniring, jTbk j(sebelumnya jbernama jPT jDuta jGraha jIndah, jTbk) jterbukti jsecara jsah jdan jmeyakinkan jbersalah jmelakukan jtindak jpidana jkorupsi jsebagaimana jdalam jdakwaan jpertama jmelanggar jPasal j2 jayat j(1) jjo. jPasal j18 jUndang-Undang jRepublik jIndonesia jNomor j31 jTahun j1999 jtentang jPemberantasan jTindak jPidana jKorupsi jsebagaimana jtelah jdiubah jdengan jUndang-Undang jRepublik jIndonesia jNomor j20 jTahun j2001 jtentang jPerubahan jAtas jUndang-Undang jRepublik jIndonesia jNomor j31 jTahun j1999 jtentang jPemberantasan jTindak jPidana jKorupsi jjo. jPasal j55 jayat j(1) jke-1 jdan jPasal j64 jayat j(1) jKitab jUndang-Undang jHukum jPidana.
* Menjatuhkan jpidana jterhadap jTerdakwa jdengan jpidana jdenda jsejumlah jRp.1.000.000.000,00 j(satu jmiliar jrupiah). jJika jdalam jjangka jwaktu jsatu jbulan jsejak jputusan jpengadilan jberkekuatan jhukum jtetap jTerdakwa jtidak jmembayar jdenda jdimaksud, jmaka jharta jbendanya jdisita joleh jJaksa jdan jdilelang juntuk jmenutupi jdenda jtersebut jdan jjangka jwaktu jsatu jbulan jdimaksud jdapat jdiperpanjang jselama jsatu jbulan jhanya jdengan jalasan jkuat.
* Menjatuhkan jpidana jtambahan jterhadap jTerdakwa juntuk jmembayar jUang jPengganti jsejumlah jRp.188.732.756.416,00 j(seratus jdelapan jpuluh jdelapan jmiliar jtujuh jratus jtiga jpuluh jdua jjuta jtujuh jratus jlima jpuluh jenam jribu jempat jratus jenam jbelas jrupiah) jselambat-lambatnya jsatu jbulan jsetelah jputusan jpengadilan jberkekuatan jhukum jtetap. jJika jdalam jjangka jwaktu jtersebut jTerdakwa jtidak jmembayar juang jpengganti jmaka jharta jbendanya jdisita joleh jJaksa jdan jdilelang juntuk jmenutupi juang jpengganti jtersebut.
* Menjatuhkan jpidana jtambahan jberupa jmencabut jhak jTerdakwa juntuk jmengikuti jlelang jproyek jpemerintah jselama j2 j(dua) jtahun jyang jselanjutnya jdalam jReplik jJaksa jPenuntut jUmum jmenjadi jmencabut jhak jTerdakwa juntuk jmengikuti jlelang jpengadaan jbarang/jasa jpemerintah jselama j1 j(satu) jtahun.
* Menetapkan jagar jbarang jbukti: jNomor j1 jsampai j355 jterlampir jdalam jberkas jperkara; jnomor j356 jsampai jdengan j357 jdirampas juntuk jNegara jsebagai jpembayaran jUang jPengganti.
* Menetapkan jbiaya jperkara jsebesar jRp.10.000,00 j(sepuluh jribu jrupiah) jdibebankan jkepada jTerdakwa.
1. **Keterangan jSaksi**

Dalam jputusan jNomor j3/Pid.Sus-TPK/Tipikor/2018/PT.DKI juntuk jmembuktikan jdakwaannya jJaksa jPenuntut jUmum jdengan jmenghadirkan j10 j(sepuluh) jsaksi jdiantaranya jDudung jPurwadi, jLaurensius jTeguh jKhasanto jTan, jWisnu jHandono, jHendri jNoor jBudiyanto, jEko jSri jWahyuni, jMohammad jEl jIdris, jJohanes jEdi jWidodo, jSoehandjono, jLatief jEfendi jSetiono, jdan jYulianis. jPada jpokoknya jterdakwa jmemberikan jketerangan jyaitu j:

* Bahwa jDudung jPurwadi jdan jMohammad jEl jIdris jterbukti jbertemu jdengan jMuhammad jNazaruddin jdengan jmaksud juntuk jmeminta jbantuan jagar jterdakwa jdapat jmemenangkan jtender jproyek jPembangunan jSarana jdan jPrasarana jRumah jSakit jKhusus jPenyakit jInfeksi jdan jPariwisata jUniversitas jUdayana jdengan jmemberikan jfee jkepada jMuhammad jNazaruddin jmelalui jYulianis jsebagai jbagian jkeuangan jPT. jAnugerah jGrup. jPada jtahun j2009, jfee jyang jdiberikan jsebesar jRp.9.274.444.000 jdan jtahun j2010 jsebesar jRp.1.016.500.000;
* Bahwa jterdakwa jselain jmelakukan jPembangunan jSarana jdan jPrasarana jRumah jSakit jKhusus jPenyakit jInfeksi jdan jPariwisata jUniversitas jUdayana, jterdakwa jjuga jmendapatkan j10 j(sepuluh) jproyek jdari jMuhammad jNazaruddin jmelalui jMindo jRosalina jManulang, jRizal jAbdullah jdan jkawan-kawan;
* Bahwa jsaksi jLaurensius jTeguh jKristanto jTan jselaku jDirektur jKeuangan jterdakwa jPT. jNusa jKonstruksi jEnjiniring jmengetahui jperilaku jtersebut jdan jsaksi jjuga jmemberikan jfee jkepada jPT. jAnugerah jGrup jseperti jMuhammad jNazaruddin. jSelain jDudung jPurwadi, jWakil jDirektur jUtama jAdi jWidodo jjuga jmengetahui jtentang jfee jtersebut jserta jmenandatangani jpembayaran jfee jproyek jdari jMuhammad jNazaruddin;
* Bahwa jselain jLurensius jTeguh jKristanto jTan jmengetahui jpemberian jfee jtersebut jdan jikut jterlibat jdalam jmembayar jfee jkepada jMuhammad jNazaruddin, jJohannes jEdi jWidodo jselaku jWakil jDirektur jUtama jjuga jmengetahui jadanya jpengeluaran jdan jbesaran jharga jfee jterhadap jbeberapa jproyek jtersebut.
1. **Keterangan jAhli**

Dalam jpemeriksaan jsaksi jahli, jjaksa jpenuntut jumum jmenghadirkan jdua jsaksi jahli jyakni j:

* Prof. jDr. jSuhadi jCahaya, jS.H., jM.H., jMBA

Ahli jdalam jpersidangan jmemberikan jpenjelasan jbahwa jkorporasi jdapat jdimintai jpertanggungjawaban jpidana jketika jkesalahan jberasal jdari jdireksi jatau jpengendali jperusahaan jdan jkeuntungan jdari jhasil jtindak jpidana jtersebut jmasuk jkepada jkorporasi. jBerdasarkan jPasal j4 jPeraturan jMahkamah jAgung jNomor j13 jTahun j2016 jtentang jTata jCara jPenanganan jPerkara jTindak jPidana jOleh jKorporasi jbahwa jminimal jterdapat j2 j(dua) jsyarat jdari j3 j(tiga jsyarat) jkorporasi jdibebani jpertanggungjawaban jpidana, jpertama jkeuntungan jmasuk, jdan jkedua jtidak jmelakukan jlangkah-langkah jatau jpembiaran.

* Muqorrobin

Dalam jpersidangan, jahli jdokumen jyang jdipergunakan juntuk jmenghitung jkerugian jkeuangan jnegara juntuk jperkara jDugaan jTindak jPidana jKorupsi jdalam jPekerjaan jPembangunan jRumah jSakit jPendidikan jKhusus jPenyakit jInfeksi jdan jPariwisata jUniversitas jUdayana jTahun jAnggaran j2009-2010 jsebanyak j28 jbukti jdalam jbentuk jfotokopi. jFotokopi jDIPA jTahun jAnggaran j2010 jNomor: j0161/023-04.2/XX/2010 jtanggal j31 jDesember j2009 jdengan jmemiliki j27 jbarang jbukti jdalam jbentuk jfotokopi, jFotokopi jlaporan jpenghitungan jatau jevaluasi jahli jteknis jITB jdan jFotokopi jberita jacara jpemeriksaan/ jketerangan jsaksi jdan jahli.

Menurut jahli jterdapat jsejumlah jfee jberupa jcek jsebesar jRp.2.949.760.000,00 jlalu jada jsejumlah jRp.1.301.800.500,00 juntuk jtahun j2009. jTahun j2010 jada jcek jsejumlah jRp.1.016.500.000.00 jdan jRp.1.198.400.000,00. jSetelah jitu, jdalam jmenghitung jkerugian jkeuangan jnegara jahli jmelakukan jaudit jinvestigasi jdan jmengumpulkan jbukti-bukti jsesuai jSOP jdari jBPKP jyang jterdiri jdari jaudit jkeuangan, jmanajemen jaudit, joperasional jaudit, jatau jaudit jkinerja, jdan jaudit jdengan jtujuan jtertentu.

1. **Keterangan jTerdakwa j**

Terdakwa jmengaku jmelakukan jtindak jpidana jkorupsi jterhadap jproyek jpengadaan jSarana jdan jPrasarana jRumah jSakit jKhusus jPenyakit jInfeksi jdan jPariwisata jUniversitas jUdayana jdengan jcara jdirektur jutama jDudung jPurwadi jbersama-sama jdengan jMohammad jEl jIdris jmelakukan jkerja jsama jdengan jMuhammad jNazarudin jselaku jpanitia jtender jproyek jUdayana juntuk jmemenangkan jtender jproyek jtersebut. jMuhammad jNazarudin jmemberikan jbantuan jkepada jterdakwa jakan jtetapi jdengan jsyarat jterdakwa jharus jmemberikan jfee jsebesar j15% jdari jnilai jreal jcost jkontrak jperjanjian jdengan jpemerintah japabila jterdakwa jmemenangkan jtender jtersebut.

Pada jpelaksanaan jtender jproyek jyang jdihadiri joleh jterdakwa jdengan jbeberapa jperusahaan jdi jbidang jjasa jdan jkonstruksi jlainnya, jmelalui jbantuan jMuhammad jNazarudin jterdakwa jdapat jmemenangkan jtender jproyek jtersebut.

Setelah jterdakwa jtelah jmemenangkan jtender jproyek, jDudung jPurwadi jmenandatangani jperjanjian jkontrak jdengan jpemerintah jdan juang jhasil jperjanjian jdengan jpemerintah jsebesar j15% jdiberikan jkepada jMuhammad jNazarudin.

1. **Barang jBukti j**

Barang jbukti jyang jditemukan joleh jpenyelidik jmaupun jpenyidik jKPK jdiserahkan jmelalui jjaksa jpenuntut jumum. jDalam jpersidangan, jjaksa jpenuntut jumum jmelampirkan jbarang jbukti jberupa jsurat jdalam jbentuk j: j1) jDokumen-dokumen jyang jterdiri jdari jsurat jperjanjian jkontrak jpekerjaan, jrancangan jpembangunan jproyek j(master jplan), jberita jacara jserah jterima jpekerjaan jperencanaan, jlaporan jakhir jpembangunan jproyek jtahun j2009- j2010, jper jkualifikasi jperkembangan jproyek. j2) jSurat jkabar jmedia jmasa jtentang jpengumuman jprakualifikasi jproyek jpembangunan jSarana jdan jPrasarana jRumah jSakit jKhusus jPenyakit jInfeksi jdan jPariwisata jUniversitas jUdayana.

1. **Pertimbangan jNon-Yuridis**
2. **Latar jbelakang jTerdakwa**

Latar jbelakang jterdakwa jmelakukan jtindak jpidana jkorupsi jadalah juntuk jmendapatkan jkeuntungan jlebih jdari jproyek jpemerintah jdengan jcara jterdakwa jdapat jmemenangkan jtender jpemerintah jdari jbantuan jMuhammad jNazarudin jselaku jpanitia jtender jproyek jpembangunan jSarana jdan jPrasarana jRumah jSakit jPendidikan jKhusus jPenyakit jInfeksi jdan jPariwisata jUniversitas jUdayana jdan jsejumlah jproyek jpembangunan jpemerintah jlainnya jdi jberbagai jdaerah.

1. **Akibat jPerbuatan jTerdakwa**

Perbuatan jterdakwa jdalam jtindak jpidana jkorupsi jtentu jakan jberakibat jpada jberkurangnya jkeuangan jnegara jdan jmemiskinkan jmasyarakat jdengan jmengambil jsebagian juang jfasilitas jbagi jmasyarakat jhanya juntuk jkeuntungan jpribadi jselaku jkorporasi jselain jitu jtindakan jterdakwa jjuga jakan jmenambah jdaftar jpanjang jkasus jkorupsi jdi jIndonesia. jTerdakwa jjuga jmerupakan jkorporasi. jSehingga jperlu jadanya jpenanganan jhukum jyang jbersifat jadil jsehingga jputusan jhakim jtidak jmenimbulkan.

Karena jperbuatan jterdakwa, jnegara jmengalami jkerugian jsejumlah jRp.25.953.784.580,57 j(dua jpuluh jlima jmiliar jsembilan jratus jlima jpuluh jtiga jjuta jtujuh jratus jdelapan jpuluh jempat jribu jlima jratus jdelapan jpuluh jrupiah jlima jpuluh jtujuh jsen). jDari jproyek jPembangunan jSarana jdan jPrasarana jRumah jSakit jKhusus jPenyakit jInfeksi jdan jPariwisata jUniversitas jUdayana. jBerdasarkan jbukti jyang jada jdalam jpersidangan jserta jfakta jbahwa jterdakwa jmerupakan jkorporasi jseharusnya jmemberikan jcerminan jkepada jperusahaan jyang jlain jbahwa jtindakan jtersebut jakan jberakibat jpidana jnantinya jdengan jhukuman jyang jpastinya jakan jmemberatkan jterdakwa.

1. **Kondisi jSosial jEkonomi jdari jTerdakwa**

Kondisi jsosial jekonomi jterdakwa jdapat jmelakukan jtindak jpidana jkorupsi jdisebabkan joleh jadanya j2000 jkaryawan jyang jharus jdihidupi joleh jterdakwa. jKaryawan jsudah j1000 jdi jPHK jdan jterdakwa jhanya jbaru jmemiliki jdua jproyek jsaat jini jdan jdinilai jtidak jcukup juntuk jmemberikan jnafkah jkepada jkaryawan jPT. jNusa jKonstruksi jEnjiniring.

1. **Putusan jHakim**

Putusan jNomor j3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI, jmejelis jhakim jPengadilan jTindak jPidana jKorupsi jPengadilan jNegeri jJakarta jPusat jmemutuskan jbahwa j:

**MENGADILI**

1. Menyatakan jTerdakwa jPT. jNusa jKonstruksi jEnjiniring, jTbk. j(sebelumnya jbernama jPT. jDuta jGraha jIndah, jTbk.), jtelah jterbukti jsecara jsah jdan jmeyakinkan jbersalah jmelakukan jtindak jpidana jKORUPSI jSECARA jBERSAMA-SAMA jDAN jBERLANJUT, jsebagaimana jdalam jDakwaan jPertama;
2. Menjatuhkan jpidana jkepada jTerdakwa joleh jkarena jitu jdengan jpidana jdenda jsejumlah jRp. j700.000.000,00 j(tujuh jratus jjuta jrupiah), jdengan jketentuan japabila jpidana jdenda jtersebut jtidak jdibayar jpaling jlambat j1 j(satu) jbulan jsetelah jputusan jpengadilan jberkekuatan jhukum jtetap, jmaka jharta jbendanya jdisita joleh jjaksa jdan jdilelang juntuk jmenutupi jdenda jtersebut jdan jjangka jwaktu j1 j(satu) jbulan jtersebut jdapat jdiperpanjang jselama j1 j(satu) jbulan jhanya jdengan jalasan jkuat;
3. Menjatuhkan jpidana jtambahan jkepada jterdakwa juntuk jmembayar jUang jPengganti jsejumlah jRp.85.490.234.737,00 j(delapan jpuluh jlima jmiliar jempat jratus jsembilan jpuluh jjuta jdua jratus jtiga jpuluh jempat jribu jtujuh jratus jtiga jpuluh jtujuh jrupiah) jdengan jketentuan japabila jUang jPengganti jtersebut jtidak jdibayar jdalam jwaktu j1 j(satu) jbulan jsesudah jPutusan jPengadilan jmemperoleh jkekuatan jhukum jtetap, jmaka jharta jbendanya jdapat jdisita joleh jJaksa jdan jdilelang juntuk jmenutupi jUang jPengganti jtersebut;
4. Menjatuhkan jpidana jtambahan jberupa jmencabut jhak jTerdakwa juntuk jmengikuti jlelang jproyek jPemerintah jselama j6 j(enam) jbulan;
5. Menetapkan jbarang jbukti j1-357 jdirampas juntuk jnegara, jdiperhitungkan jsebagai jpembayaran juang jpengganti;
6. Membebankan jbiaya jperkara jkepada jterdakwa jsebesar jRp.10.000 j(sepuluh jribu jrupiah).
7. **Pembahasan j**
8. **Perbuatan jPT jNKE jdalam jPutusan jNomor j3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI jdapat jDiklasifikasikan jsebagai jTindak jPidana jKorporasi jatau jtidak**

Perbuatan jdireksi jPT jNKE jdalam jputusan jNomor j3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI jtelah jmelanggar jPasal j3, jPasal j5 jdan jPasal j33 jayat j(2) jPeraturan jPresiden jNomor j80 jTahun j2003 jdengan jbeberapa jperubahannya jdan jterakhir jdengan jPeraturan jPresiden jNomor j95 jTahun j2007 jyaitu jterdakwa jselaku jDirektur jUtama jTahun j2009-2010 jmelakukan jkesepakatan jdalam jpengaturan jproyek jpembangunan jrumah jsakit jkhusus jinfeksi jdan jpariwisata jUniversitas jUdayana jTahun jAnggaran j2009 jdan jAnggaran j2010 jdalam jrangka jmemenangkan jPT jNKE jsebagai jpelaksana jpekerjaan j(rekanan), jyang jbertentangan jdengan jkeputusan jPresiden jNomor j80 jTahun j2003 jtentang jPedoman jPelaksanaan jPengadaan jBarang/Jasa jPemerintahan jsebagaimana jtelah jbeberapa jkali jdiubah jdan jterakhir jdengan jPeraturan jPresiden jNomor j95 jTahun j2007. jSelanjutnya jpetunjuk jdari jTeknis jPelaksanaanya, jmelakukan jperbuatan jmemperkaya jdiri jsendiri jatau jorang jlain jatau jsuatu jkorporasi jyakni jmemperkaya jPT jNKE jpada jTahun j2009 jsetidak-tidaknya jsebesar jRp.6.780.551.865,00 j(enam jmiliar jtujuh jratus jdelapan jpuluh jjuta jlima jratus jlima jpuluh jsatu jribu jdelapan jratus jenam jpuluh jlima jrupiah) jdan jpada jtahun j2010 jsetidak-tidaknya jsebesar jRp.17.998.051.740,00 j(tujuh jbelas jmiliar jsembilan jratus jsembilan jpuluh jdelapan jjuta jlima jpuluh jsatu jribu jtujuh jratus jempat jpuluh jrupiah) jserta jmemperkaya jMUHAMMAD jNAZARUDIN jdan jkorporasi jyang jdi jbawah jkendalinya jyakni jPT jAnak jNegeri, jPT jAnugerah jNusantara jdan jGrup jPermai jsejumlah jRp.10.290.944.000,00 j(sepuluh jmiliar jdua jratus jsembilan jpuluh jjuta jsembilan jratus jempat jpuluh jempat jribu jrupiah), jyang jdapat jmerugikan jkeuangan jnegara jatau jperekonomian jnegara jsejumlah jRp.25.953.784.580,57 j(dua jpuluh jlima jmiliar jsembilan jratus jlima jpuluh jtiga jjuta jtujuh jratus jdelapan jpuluh jempat jribu jlima jratus jdelapan jpuluh jrupiah jkoma jlima jpuluh jtujuh jsen) jatau jsetidak-tidaknya jsejumlah jitu.

Pengklasifikasian jseorang jdireksi jdikategorikan jsebagai jkaryawan jatau jpimpinan jyang jmemiliki jlevel jtinggi jdalam jsuatu jperusahaan, jmaka jpenting juntuk jditentukan japakah jpelaku jmerupakan jorgan jprimer jperusahaan jatau jtidak. jDalam jpenentuan jorgan jprimer jatau jtidak jdapat jdiketahui jdengan jmelihat japakah jorang jtersebut jdisebutkan jdalam jdokumen jresmi jperusahaan jdan jmelakukan jsuatu jtindakan jberdasarkan jotoritas jyang jsecara jlangsung jdiberikan joleh jdokumen-dokumen jresmi jterkait jpendirian jperusahaan jtanpa jadanya jcampur jtangan jatau jperintah jorang jlain jlagi j(atasan jatau jpimpinan jperusahaan). jSehingga, jdengan jmenggunakan jkriteria jini jsuatu jkesalahan jkorporasi jyang jdapat jdipertanggungjawabkan joleh j jkorporasi jialah jtindak jpidana jyang jdilakukan joleh jpimpinan jperusahaan jyang jsecara jjelas jdan jtegas jdisebutkan jdalam jdokumen jperusahaan. jPasal j3 jPerma jmengatur jTindak jPidana jKorporasi jsebagai jberikut j;

*“Tindak jpidana joleh jKorporasi jmerupakan jtindak jpidana jyang jdilakukan joleh jorang jberdasarkan jhubungan jkerja, jatau jberdasarkan jhubungan jlain, jbaik jsendiri-sendiri jmaupun jbersama-sama jyang jbertindak juntuk jdan jatas jnama jKorporasi jdi jdalam jmaupun jdi jluar jLingkungan jKorporasi.”*

Berdasarkan jPerma jKorporasi, jsetidaknya jterdapat jdua jpihak jyang jtindakannya jdapat jdiklasifikan jsebagai jtindak jpidana joleh jkorporasi. jYang jpertama, jpihak jyang jmemiliki jhubungan jkerja jdalam jkorporasi jtersebut. jKedua, jpihak jyang jtidak jmemiliki jhubungan jpekerjaan jdengan jkorporasi, jnamun jmemiliki jhubungan jlain jdengan jkorporasi jtersebut.

Jika jkita jkembali jkepada jpengklasifikasian jpihak-pihak jyang jdapat jdianggap jsebagai jtindak jpidana jkorporasi, jmaka jpada jklasifikasi jyang jpertama jjelas jdan jmudah juntuk jdimengerti, jsebab jmerupakan jhal jyang jwajar jmanakala jperusahaan jselayaknya jbertanggung jjawab jatas jperbuatan jyang jdilakukan joleh janak jbuahnya. jSepanjang jpegawai jkorporasi jtersebut jmelakukan jtindak jpidana jyang jmasih jterkait jdengan jhubungan jkerjanya, jdilakukan jdalam jlingkup jhubungan jkerja, jdan jpekerjaan jtersebut jmemang jdiserahkan joleh jkorporasi juntuk jdikerjakan joleh jorang jtersebut. jSedangkan jklasifikasi jyang jkedua jmemang jseakan jkontra-intuitif, jnamun jpada jdasarnya jketentuan jtersebut jdibuat jdengan jalasan jyang jbersifat jamat jesensial. jDengan jkata jlain, jketentuan jpidana jpada jPasal j155 jUUPT jTahun j2007 jmenjadi jtidak jdapat jditerapkan jkepada jDireksi japabila jkeputusan jbisnis jDireksi jbukan jkarena jkesalahan jatau jkelalaian jDireksi, jkeputusan jdiambil jdengan jitikad jbaik jdan jhati-hati j(*prudent*), jsesuai jdengan jmaksud jdan jtujuan jdidirikannya jperseroan, jtidak jterdapat j*conflict jof jinterest* j(benturan jkepentingan) jketika jDireksi jmengambil jkeputusan jbisnis, jdan jtetap jberupaya juntuk jmencegah jtimbulnya jkerugian jdan jberlanjutnya jkerugian jsecara jberkepanjangan.

Fakta jhukum jterkait jperbuatan jdireksi jPT jNKE jdapat jdiklasifikasikan jsebagai jpelaku jkejahatan jkorporasi, jyang jtelah jterbukti jsecara jsah jdan jmeyakinkan jbersalah jmelakukan jtindak jpidana jkorupsi jsecara jbersama-sama. jPT jNKE jdijerat jdalam jkasus jdugaan jtindak jpidana jkorupsi jpembangunan jRS jPendidikan jKhusus jPenyakit jInfeksi jdan jPariwisata jUniversitas jUdayana jTahun janggaran j2009-2010. jPada jperbuatan jtersebut jdiduga jtelah jmenimbulkan jkerugian jnegara jsebesar jRp. j25.953 jMiliar. jPT jNKE jdidakwa jmelawan jhukum jmembuat jkesepakatan jmemenangkan jperusahaannya jdalam jlelang jproyek jPembangunan jRumah jSakit jKhusus jInfeksi jdan jPariwisata jUniversitas jUdayana jTahun jAnggaran j2009-2010. jPT jNKE jjuga jdinilai jmemperkaya jdiri jsendiri jselaku jkorporasi jsejumlah jRp.24.778 jMiliar. jAtas jperbuatan jdari jPT jNKE jtersebut, jjaksa jKPK jmenuntut jPT jNKE jmembayar jPidana jdenda jsebesar jRP j1 jMiliar. jDan jdituntut jpidana jtambahan jdengan jmembayar juang jpengganti jsebesar jRp. j188.1732.756.416, jjaksa jjuga jmenuntut jhak jdari jPT jNKE jmengikuti jlelang jproyek jpemerintah jdicabut jselama jdua jtahun j(Rachman j2019).

Pertimbangan jhakim, jsubjek jhukum jadalah jbadan jhukum jyaitu jterdakwa jPT jNKE, jMuhammad jNazarudin, jtelah jbertambah jkekayaannya jdengan jjumlah jtertentu. jOleh jkarena jitu, jmajelis jberpendapat jbahwa junsur j“melakukan jperbuatan jmemperkaya jdiri jsendiri jatau jorang jlain jatau jsuatu jkorporasi” jtelah jterpenuhi jsecara jsah jdan jmeyakinkan jpada jperbuatan jterdakwa.

Dalam jpersidangan jterbukti jbahwa jDudung jPurwadi jselaku jDirektur jUtama jPT. jNKE jdan jMohammad jEl jIdris jselaku jWakil jDirektur jUtama jPT. jNKE jmerupakan janggota jdireksi jdalam jhubungan jkerja jyang jdiikatkan jdengan janggaran jdasar jdan jperubahannya j(RUPS). jSelain jitu, jJohannes jEdi jWidodo jselaku jWakil jDirektur jUtama jdan jLaurensius jTeguh jKhasanto jTan jselaku jDirektur jPT. jNKE jmengetahui jdan jmelakukan jpemberiam j*fee* jkepada jMuhammad jNazaruddin.

Dudung jPurwadi jdan jMohammad jEl jIdris jsecara jbersama-sama jtelah jmelakukan jtindak jpidana jkorupsi juntuk jmemenangkan jlelang jproyek jpembangunan jsarana jdan jprasarana jRS jPendidikan jKhusus jPenyakit jInfeksi jdan jPariwisata jUniversitas jUdayana jTahun jAnggaran j2009-2010 jdengan jcara jmeminta jbantuan jterhadap jMuhammad jNazaruddin jselaku jpanitia jtender jpembangunan jtersebut jdan jsekaligus jpemilik jPT. jAnugerah jGroup. jSesuai jkesepakatan jMuhammad jNazaruddin jmendapatkan *jfee* j15% jdari jnilai jreal jcost jkontrak jdengan jpemerintah. jPernyataan jtersebut jdisampaikan joleh jMindo jRosalina jselaku jpihak jPT. jAnugerah jGrup jkepada jMohammad jEl jIdris. jPada jsaat jmelaporkan jhasil jpembangunan jyang jdilakukan joleh jPT. jNKE, jDudung jPurwadi jmemalsukan jberita jacara jhasil jpembangunan jdan jdari jsemua jtindak jpidana jtersebut, jkeuntungannya jdimasukkan jke jkas jterdakwa jsehingga jterdakwa jPT. jNKE jmendapatkan jkeuntungan jdan jmanfaat jdari jperbuatan jpengurus jterdakwa. jKetua jdireksi jPT jNKE jDudung jPurwadi j jjuga jmembiarkan jterjadinya jtindak jpidana jtersebut jdan jterdakwa jjuga jmelakukan jpencegahan jatas jtindak jpidana jkorupsi. jSelain jitu, jterdakwa jjuga jterbukti jmelakukan jtindak jpidana jkorupsi jkepada jketujuh jproyek jlainnya jyang jberasal jdari jbantuan jMuhammad jNazaruddin.

Kesimpulannya jperbuatan jterdakwa jjuga jdapat jdiklasifikasikankan jdalam jPasal j3 jdan jPasal j4 jayat j(2) jPerma jNomor j13 jTahun j2016 jtentang jTata jCara jPenanganan jPerkara jTindak jPidana jOleh jKorporasi jjuga jmemberikan jpenjelasan jmengenai jkapan jsuatu jkorporasi jdapat jdikenakan jpertanggungjawaban jpidana. jPada jPasal j3 jmenyebutkan jbahwa j:

*“Tindak jpidana joleh jkorporasi jmerupakan jtindak jpidana jyang jdilakukan joleh jorang jberdasarkan jhubungan jkerja jatau jberdasarkan jhubungan jlain, jbaik jsendiri jmaupun jbersama-sama jyang jbertindak juntuk jdan jatas jnama jkorporasi jdi jdalam jmaupun jdiluar jlingkungan jkorporasi”.*

Terdakwa jsaat jmelakukan jtindak jpidana jkorupsi jterbukti jmemperoleh jkeuntungan jsebesar jRp.240.098.133.310 jyang jberasal jdari jproyek jPengadaan jSarana jdan jPrasarana jPendidikan jKhusus jPenyakit jInfeksi jdan jPariwisata jUniversitas jUdayana jdan jjuga jketujuh jproyek jlainnya, jbahkan jpengurus jkorporasi jbagian jDirektur jKeuangan jdan jWakil jDirektur jterdakwa jmengetahui jtindak jpidana jtersebut jdengan jmemberikan j***fee*** jsebesar j15% jkepada jMuhammad jNazaruddin jsesuai jdengan jperjanjian jsebelumnya.

Sehingga jperbuatan jterdakwa jsesuai jdengan jPasal j4 jayat j(2) jPerma jNomor j13 jTahun j2016 jtentang jTata jCara jPenanganan jPerkara jTindak jPidana jOleh jKorporasi jmenyebutkan jbahwa j:

*“(2) jDalam jmenjatuhkan jpidana jterhadap jKorporasi, jHakim jdapat jmenilai jkesalahan jKorporasi jsebagaimana jayat j(1) jantara jlain j:*

*a. jKorporasi jdapat jmemperoleh jkeuntungan jatau jmanfaat jdari jtindak jpidana jtersebut jatau jtindak jpidana jtersebut jdilakukan juntuk jkepentingan jKorporasi;*

*b. jKorporasi jmembiarkan jterjadinya jtindak jpidana; jatau*

*c. jKorporasi jtidak jmelakukan jlangkah-langkah jyang jdiperlukan juntuk jmelakukan jpencegahan, jmencegah jdampak jyang jlebih jbesar jdan jmemastikan jkepatuhan jterhadap jketentuan jhukum jyang jberlaku jguna jmenghindari jterjadinya jtindak jpidana.”*

Berdasarkan jPasal j20 jayat j(2) jUndang-Undang jPemberantasan jTindak jPidana jKorupsi jdan jdihubungkan jdengan junsur jkesalahan jactus jreus jdan jmens jrea, jmaka jpertanggungjawaban jpidana jkorporasi jterhadap jPT. jNKE jdalam jputusan jperkara jnomor j3/pid.sus-tpk/2018/pt.dki jtelah jterpenuhi.

1. **Pidana jyang jDiputuskan joleh jHakim jSudah jSesuai jatau jTidak jDengan jKeadilan jSubstantif jdi jMasyarakat**

Mertokusumo jberpendapat jbahwa j: jseorang jsarjana jhukum jkhususnya jhakim, jselayaknya jmenguasai j jpenyelesaian jperkara j(*the jpower jof jsolving jlegal jproblems*), jyang jterdiri jdari jtiga jkegiatan, jyaitu; jmerumuskan jmasalah jhukum j(*legal jproblem jidentification*), jmemecahkannya j(*legal jproblem jsolving*), jdan jmengambil jputusan j(*decision jmaking*)**(Syamsudin 2012)**. Oleh jkarena jitu jdibutuhkan jlangkah-langkah jpenalaran jhukum jyang jtepat jdalam jproses jmemecahkan jmasalah jhukum jtersebut. j jPada jpendekatan j*socio jlegal* jakan jdapat jmemahami jpersoalan jhukum jdalam jmasyarakat jlebih jkontekstual jterkait jdengan jkondisi j*socio jcultural* jmasyarakatnya, jdemikianlah jyang jdianggap jmelahirkan jkeadilan jsubstansif.

Pada jputusan jhakim, jkeadilan jsubstantif jtidak jhanya jmengakomodir jaturan jyang jberlaku jdalam jtahapan jpenemuan jkeadilan jyang jpaling jsosial. jKeadilan jbukanlah jhal jsemata-mata jpersoalan jyuridis jsemata, jakan jtetapi jmasalah jsosial jyang jdalam jbanyak jhal jdisoroti joleh jsosiologi jhukum. jKarakter jkeadilan jsubstantif jyang jbertumpu jpada j‘respon’ jmasyarakat, jdengan jindah jmembentuk jpenyelesaian jpermasalahan jbersandar jpada jhukum jyang jmendalami jsuara jhati jmasyarakat. jArtinya, jhukum jmampu jmengenali jkeinginan jpublik jdan jpunya jkomitmen jbagi jtercapainya jkeadilan jsubstantif j(Syamsudin 2012).

Isi jdari jkeadilan jsubstantif jdalam jputusan jhakim, jmenurut jLuthan jdan jSyamsyudin jsebagai jberikut; jkeadilan jsubstantif jterkait jdengan jisi jputusan jhakim jdalam jmengadili jsuatu jperkara, jyang jdibuat jberdasarkan jpertimbangan jyang jobjektif, jjujur, jimparsial jdan jrasional j(logis) **(Syamsudin 2012)**. Berdasarkan jkonsep jtersebut, jada jempat jciri juntuk jmengukur japakah jputusan jhakim jmengandung jkeadilan jsubstantif jatau jtidak, jyaitu; jadanya jobjektivitas, jkejujuran, jimparsialitas, jdan jrasionalitas.

Undang-Undang jNomor j48 jTahun j2009 jtentang jKekuasaan jKehakiman jyang jsalah jsatu jpasalnya jmengatur jtentang jpertimbangan jhakim jyakni jPasal j5 jayat j(1) jmenyebutkan jbahwa j:

“*Hakim jdan jhakim jkonstitusi jwajib jmenggali, jmengikuti, jdan jmemahami jnilai-nilai jhukum jdan jrasa jkeadilan jyang jhidup jdalam jmasyarakat.”*

Dan jPasal j8 jayat j(2) jmenyebutkan jbahwa j:

*“Dalam jmempertimbangkan jberat jringannya jpidana, jhakim jwajib jmemperhatikan jpula jsifat jyang jbaik jdan jjahat jdari jterdakwa”.*

Pertimbangan jhakim jdalam jputusannya jtidak jhanya jbersifat jlogis, jrasional jdan jilmiah, jakan jtetapi jharus jbersifat jintuitif jirasional. jIntuitif jirasional jadalah jkepekaan jhati jnurani jdan jperasaan jyang jseimbang jdengan jrasio jdan jlogika jsehingga jdapat jmelahirkan jkeadilan.

Pasal j20 jayat j(2) jUndang-Undang jPemberantasan jTindak jPidana jKorupsi jdan jdihubungkan jdengan junsur jkesalahan jactus jreus jdan jmens jrea, jmaka jpertanggungjawaban jpidana jkorporasi jPT. jNKE jdalam jputusan jperkara jnomor j3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI jtelah jterpenuhi. jMaka jseharusnya jterdakwa jtidak jhanya jdijatuhkan jPasal j2 jayat j(1) jUndang-Undang jPemberantasan jTindak jPidana jKorupsi, jakan jtetapi jterdakwa jbisa jdijatuhi jPasal j20 jUndang-Undang jPemberantasan jTindak jPidana jKorupsi jdengan jketentuan jPasal j20 jayat j(7) jUndang-Undang jPemberantasan jTindak jPidana jKorupsi jyakni jpenjatuhan jmaksimum jpidana jdenda jnya jditambah j1/3. jMenurut jpenulis, jpenjatuhan jpidana jdenda jdengan jpenambahan jpidana jdenda jmaksimum jditambah j1/3 jbertujuan juntuk jmemenuhi jrasa jkeadilan jdan jmemenuhi jtujuan jpemidanaan, jkarena jpenjatuhan jpidana jdenda joleh jhakim jpada jkasus jtersebut jbelum jmenimbulkan jefek jjera jkepada jterdakwa jselaku jkorporasi jdan jtidak jmemenuhi jrasa jkeadilan jkarena jrendahnya jjumlah jpidana jdenda jyang jdijatuhkan jkepada jterdakwa jserta jtidak jmemenuhi jtujuan jpemidanaan jbaik jtujuan jpemidanaan jabsolut, jrelatif, jdan jgabungan.

Berdasarkan jPasal j18 jayat j(1) jhuruf jb jUU jTipikor jmenjelaskan jbahwa:

*“pembayaran juang jpengganti jyang jjumlahnya jsebanyak-banyaknya jsama jdengan jharta jbenda jyang jdiperoleh jdari jtindak jpidana jkorupsi”.*

Secara jyuridis jhal jini jdapat jdiartikan jbahwa jkerugian jyang jdibebankan jkepada jterdakwa jadalah jkerugian jnegara jyang jbesarnya jnyata jdan jpasti jjumlahnya jsebagai jakibat jperbuatan jmelawan jhukum jbaik jsengaja jmaupun jlalai jyang jdilakukan joleh jterdakwa jtersebut j(ibid).

Hal jini jsesuai jdengan jPasal j1 jangka j15 jUndang-Undang jNomor j15 jTahun j2006 jtentang jBadan jPemeriksaan jKeuangan jyang jberbunyi j:

*“Kerugian jNegara/Daerah jadalah jkekurangan juang, jsurat jberharga, jdan jbarang, jyang jnyata jdan jpasti jjumlahnya jsebagai jakibat jperbuatan jmelawan jhukum jbaik jsengaja jmaupun jlalai”.*

Menurut jpendapat jEddy jMulyadi jSoepardi jtujuan jditentukannya jkerugian jkeuangan jnegara jadalah juntuk jmenentukan jjumlah juang jpengganti jatau jtuntutan jganti jrugi jsebagai jsalah jsatu jpatokan jjaksa juntuk jmelakukan jpenuntutan jmengenai jberat jatau jringannya jhukuman jdan jsebagai jbahan jgugatan jatau jpenuntutan jsesuai jyang jberlaku jdalam jkasus jperdata j(Serbabagus 2017).

Apabila jdihubungkan jdengan jkasus jPT. jNKE, jjumlah jkerugian jkeuangan jnegara jyang jditentukan joleh jBadan jPemeriksa jKeuangan jdan jPembangunan j(BPKP) jsebesar jRp.25.953.784.580,57. jAkan jtetapi, jjaksa jmenuntut jbahwa jterdakwa jdengan jjumlah jpidana juang jpengganti jsebesar jRp.188.732.756.416,00 jdan jhakim jmemutuskan jbahwa jjumlah jpidana juang jpengganti jyang jdijatuhkan jkepada jterdakwa jsebesar jRp.85.490.234.737,00.

Maka jdapat jmenjadi jpembahasan jbagi jpenulis jkarena jterdapat jkeganjilan jdalam jmenentukan jjumlah jpidana juang jpengganti. jDimana jpenuntutan jdan jpenjatuhan jpidana juang jpengganti jditentukan jtidak jhanya jdari jproyek. jPembangunan jSarana jdan jPrasarana jRumah jSakit jKhusus jPenyakit jInfeksi jdan jPariwisata jUniversitas jUdayana jsaja, jmelainkan jketujuh jproyek jlainnya, jsedangkan jakibat jyang jditimbulkan jdari jperbuatan jterdakwa jyakni jmenikmati jharta jbenda jhasil jkorupsi jberupa jkerugian jkeuangan jnegara jhanya jditentukan joleh jproyek jPengadaan jSarana jdan jPrasarana jPendidikan jKhusus jPenyakit jInfeksi jdan jPariwisata jUniversitas jUdayana jtahun janggaran j2009-2010.

Hal jini jsangat jmerugikan jkeuangan jnegara japabila jpenjatuhan jpidana juang jpengganti jtidak jdisesuaikan jdengan jkerugian jkeuangan jnegara jdan jperaturan jperundang-undangan jyang jberlaku. jKarena jperbuatan jtersebut jtidak jhanya jmerugikan jmasyarakat jtetapi jnegara jjuga jdirugikan jdari jtindak jpidana jkorupsi. jSerta jdapat jmenimbulkan jputusan jtersebut jmenjadi jtidak jsesuai jdengan jtujuan jpemidanaan jdan jterdakwa jdalam jmempertanggungjawabkan jperbuatannya jmenjadi jtidak jsempurna.

Pada jkerugian jnegara jmenurut jUndang-Undang jNomor j1 jTahun j2004 jtentang jPerbendarahan jNegara jmengatakan jkerugian jnegara jadalah jkekurangan juang, jsurat jberharga jdan jbarang jyang jnyata jdan jpasti jjumlahnya jsebagai jakibat jdari jperbuatan jmelawan jhukum jbaik jsengaja jmaupun jlalai. jSenada jdengan jUndang-Undang jNomor j1 jTahun j2004, jbuku jpetunjuk jBadan jPemeriksaan jKeuangan jmemberikan jdefinisi jmengenai jkerugian jnegara jyaitu jberkurangnya jkekayaan jnegara jyang jdisebabkan joleh jsuatu jtindakan jmelanggar jhukum jatau jkelalaian jseseorang jdan/atau jdisebabkan joleh jsuatu jkeadaan jdiluar jdugaan jdan jdi jluar jkemampuan jmanusia. jBerdasarkan jfakta-fakta jyang jterungkap jdi jpersidangan jbahwa jkasus jPT. jNKE jdapat jmengakibatkan jmunculnya jkerugian jkeuangan jnegara jsejumlah jRp.25.953.784.580,57 j(dua jpuluh jlima jmiliar jsembilan jratus jlima jpuluh jtiga jjuta jtujuh jratus jdelapan jpuluh jempat jribu jlima jratus jdelapan jpuluh jrupiah jlima jpuluh jtujuh jsen).

Jumlah jkerugian jkeuangan jnegara jtersebut jdiambil jatas jkasus jProyek jPengadaan jPembangunan jSarana jdan jPrasarana jRumah jSakit jdan jPariwisata jUniversitas jUdayana jtahun j2009 jdan j2010. **Pada** tahun j2009 jkerugian jkeuangan jnegara jyang jdiakibatkan jadalah jsebesar jRp.7.837.004.150,81 j(tujuh jmiliar jdelapan jratus jtiga jpuluh jtujuh jjuta jempat jribu jseratus jlima jpuluh jrupiah jdelapan jpuluh jsatu jsen). Pada jtahun j2010 jjumlah jkerugian jkeuangan jnegara jyang jdiakibatkan jadalah jsejumlah jRp.18.116.780.429,76 j(delapan jbelas jmiliar jseratus jenam jbelas jjuta jtujuh jratus jdelapan jpuluh jribu jempat jratus jdua jpuluh jsembilan jrupiah jtujuh jpuluh jenam jsen).

Mahkamah jberpendapat, jkerugian jyang jterjadi jdalam jtindak jpidana jkorupsi, jterutama jyang jberskala jbesar, jsangat jsulit juntuk jdibuktikan jsecara jtepat jdan jakurat. jKetepatan jyang jdituntut jsedemikian jrupa, jakan jmenimbulkan jkeraguan, japakah jjika jsatu jangka jjumlah jkerugian jdiajukan jdan jtidak jselalu jdapat jdibuktikan jsecara jakurat, jnamun jkerugian jtelah jterjadi, jakan jberakibat jpada jterbukti jtidaknya jperbuatan jyang jdidakwakan. jHal jdemikianlah jtelah jmendorong jantisipasi jatas jakurasi jkesempurnaan jpembuktian, jsehingga jmenyebabkan jdianggap jperlu jmempermudah jbeban jpembuktian jtersebut. jDalam jhal jtidak jdapat jdiajukan jbukti jakurat jatas jjumlah jkerugian jnyata jatau jperbuatan jyang jdilakukan jadalah jsedemikian jrupa jbahwa jkerugian jnegara jdapat jterjadi, jtelah jdipandang jcukup juntuk jmenuntut jdan jmemidana jpelaku, jsepanjang junsur jdakwaan jlain jberupa junsur jmemperkaya jdiri jatau jorang jlain jatau jsuatu jkorporasi jdengan jcara jmelawan jhukum j(*wederrechtelijk*) jtelah jterbukti. jKarena, jtindak jpidana jkorupsi jdigolongkan joleh jundang- jundang ja jquo jsebagai jdelik jformil. jDengan jdemikian, jkategori jtindak jpidana jkorupsi jdigolongkan jsebagai jdelik jformil, jdi jmana junsur-unsur jperbuatan jharus jtelah jdipenuhi, jdan jbukan jsebagai jdelik jmateril, jyang jmensyaratkan jakibat jperbuatan jberupa jkerugian jyang jtimbul jtersebut jharus jtelah jterjadi. jKata j“dapat” jsebelum jfrasa j”merugikan jkeuangan jnegara jatau jperekonomian jnegara”, jdapat jdilihat jdalam jarti jyang jsama jdengan jkata j“dapat” jyang jmendahului jfrasa j“membahayakan jkeamanan jorang jatau jbarang, jatau jkeselamatan jnegara jdalam jkeadaan jperang”, jsebagaimana jtermuat jdalam jPasal j387 jKUHP. jDelik jdemikian jdipandang jterbukti, jkalau junsur jperbuatan jpidana jtersebut jtelah jterpenuhi, jdan jakibat jyang jdapat jterjadi jdari jperbuatan jyang jdilarang jdan jdiancam jpidana jtersebut, jtidak jperlu jharus jtelah jnyata jterjadi j(Serbabagus 2017).

Maka jdalam jhal jini, jpertimbangan jdalam jputusan jhakim jtidak jhanya jbersifat jlogis, jrasional jdan jilmiah jtetapi jharus jbersifat jintuitif jirasional. jIntuitif jirasional jadalah jkepekaan jhati jnurani jdan jperasaan jyang jseimbang jdengan jrasio jdan jlogika jsehingga jdapat jmelahirkan jkeadilan. jMeskipun jjaksa jdan jhakim jmemiliki jpenilaian jtersendiri jdalam jmenentukan jjumlah jpidana juang jpengganti jakan jtetapi jjaksa jdan jhakim jjuga jharus jmengikuti jketentuan jpidana juang jpengganti jdan jkerugian jkeuangan jnegara jsebagaimana jyang jtelah jdiatur jdalam jperaturan jperundang-undangan jsehingga jpendekatan jperhitungan jkerugian jkeuangan jnegara jdilakukan joleh jyang jberwenang jseperti jjaksa jdan jBPKP jbisa jlebih jkompeten, jprofesional, jdan jindependen) jsehingga jdalam jpenuntutan jsampai jputusan joleh jjaksa jpenuntut jumum jdan jhakim jbenar-benar jadil jsesuai jkonteks jkeadilan jyang jsesungguhnya jdan jsesuai jfakta jpengadilan jdan jmenjunjung jtinggi jtujuan jnya jyaitu jmemulihkan jkerugian jkeuangan jnegara jdan jbernilai jefektif jserta jsesuai jdengan jkeadilan jmasyarakat.

Keadilan substantif dalam penegakan hukum pidana di pengadilan, hanya dapat dihadirkan melalui pendekatan *legal pluralisme* dengan memperhatikan *state law, living law* dan *natural law* secara simultan. Dalam penegakan hukum dipertimbangkan *natural law* (*moral ethic and religion*), maka permasalahan hukum telah melampaui ketiga sistem hukum dari Lawrence M. Friedmen, sebagai *subtance, structure and legal culture,* melainkan pada derajat diri kesadaran manusia yang bersumber dari hati nurani (intuisi).

Menurut Mahfud MD, menegakkan nilai-nilai keadilan lebih utama daripada sekedar menjalankan berbagai prosedur formal perundang-undangan yang dikaitkan dengan penegakan hukum (Setyanegara 2013). Tekad Mahkamah Konstitusi semacam itu bahkan ditegaskan dalam situsnya, yaitu “mengawal demokrasi dan menegakkan keadilan substantif”. Beberapa terobosan hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi yang lebih mengutamakan keadilan substantif dibanding keadilan formal-prosedural diantaranya adalah saat Mahkamah Konstitusi membolehkan penggunaan KTP dengan sejumlah syarat tertentu dalam pemilu oleh warga yang tidak terdaftar dalam daftar pemilihan tetap (DPT). Mahkamah Konstitusi dalam persidangan *judicial review* pernah membuka rekaman hasil penyadapan KPK terhadap percakapan Anggodo yang kemudian membuka tabir adanya “markus” dalam proses penegakan hukum. Dalam hal ini penulis berpendapat, semestinya hakim terlebih dulu mengedepankan pilihan keadilan substantif, yang sesuai dengan hati nurani dan rasa keadilan masyarakat. Keadilan substantif dalam penegakan hukum pidana di pengadilan, hanya dapat dihadirkan melalui pendekatan *Legal Pluralisme* dengan memperhatikan *state law, living law* dan *natural law* secara simultan.

**PENUTUP**

**KESIMPULAN**

Kesimpulan yang dapat diberikan berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan terkait perbuatan direksi PT.NKE dapat diklasifikasikan sebagai pelaku kejahatan korporasi, yang memang telah terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Pasal 20 ayat (2) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dihubungkan dengan unsur kesalahan *actus reus* dan *mens rea*, maka pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap PT.NKE dalam putusan perkara nomor 3/pid.sus-tpk/2018/pt.dki telah terpenuhi.

Pada pendekatan *socio legal* dapat kita pahami persoalan hukum dalam masyarakat lebih konteksual terkait dengan kondisi *socio cultural* masyarakatnya, yang dianggap dapat melahirkan keadilan substantif. Maka pertimbangan dalam putusan hakim tidak hanya bersifat logis, rasional dan ilmiah tetapi harus bersifat intuitif irasional. Meskipun jaksa dan hakim memiliki penilaian tersendiri dalam menentukan jumlah pidana uang pengganti akan tetapi jaksa dan hakim juga harus mengikuti ketentuan pidana uang pengganti dan kerugian keuangan negara sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga pendekatan perhitungan kerugian keuangan negara dilakukan oleh yang berwenang seperti jaksa dan BPKP bisa lebih kompeten, profesional, dan independen) sehingga dalam penuntutan sampai putusan oleh jaksa penuntut umum dan hakim benar-benar adil sesuai konteks keadilan yang sesungguhnya. Dalam hal ini penulis berpendapat, semestinya hakim terlebih dulu mengedepankan pilihan keadilan substantif, yang sesuai dengan hati nurani dan rasa keadilan masyarakat. Keadilan substantif dalam penegakan hukum pidana di pengadilan, hanya dapat dihadirkan melalui pendekatan *Legal Pluralisme* dengan memperhatikan *state law, living law* dan *natural law* secara simultan.

**SARAN**

Saran yang dapat penulis sampaikan untuk Jaksa Penuntut Umum dan Hakim dalam menentukan uang pengganti harus benar-benar teliti, karena Korupsi merupakan kejahatan yang terorganisasi yang dapat mengakibatkan dampak yang luar biasa terhadap perekonomian negara dan masyarakat. Perhitungan kerugian keuangan negara dilakukan seharusnya dilakukan oleh pejabat yang berwenang, sehingga dalam penuntutan sampai putusan hakim benar-benar adil sesuai konteks keadilan yang sesungguhnya.

**DAFTAR jPUSTAKA**

Agiyanto, Ucuk. 2013. “PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA : Eksplorasi Konsep Keadilan Berdimensi Ketuhanan.” *Hukum Ransendental* (4):493–503.

Ali, Mahrus. 2014. “Hubungan Antara Sumber dan Metode Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dengan Penetapan Uang Pengganti.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 21(1):43–60.

Aries, Albert. 2018. “Pertanggungjawaban Pengurus dalam Tindak Pidana Korporasi.”

Damayanti, Tika. 2015. “PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP KORPORASI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Putusan No:936.K/PID.SUS/2009.MA).”

Kurniawan, Erlangga. 2019. “KONSEP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DI INDONESIA.” 1(40).

Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum*. Revisi. Jakarta: Kencana.

Putusan, Direktori, Mahkamah Agung, Republik Indonesia, dan Apartemen Dharmawangsa. 2018. *Putusan PT JAKARTA Nomor 3/PID.TPK/2018/PT DKI Tanggal 12 Februari 2018 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : KRESNO ANTO WIBOWO, SH.,MH. Terbanding/Pembanding/Terdakwa : DUDUNG PURWADI*.

Rachman, Dylan Aprialdo. 2019. “Perjalanan Kasus PT NKE, Korporasi Pertama Yang Divonis Korupsi.” *Kompas.com*.

Serbabagus, S. Serbabagus. 2017. “Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara Pada Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi.” *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan* 1(1).

Setyanegara, Ery. 2013. “Kebebasan Hakim Memutus Perkara Dalam Konteks Pancasila (Ditinjau Dari Keadilan ‘Substantif’).” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 43(4):434.

Syamsudin, M. 2012. “KEADILAN SUBSTANTIF YANG TERABAIKAN DALAM SENGKETA SITA JAMINAN.” *Jurnal Yudisial* Vol. 5 No.